

Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara

Raudatun Nazwa ^{1*}, Alifya Zhafira ², Annisa Hamdah ³, Mufti Wardani ⁴,
Ahmad Muhajir ⁵, Anwar Hafidzi ⁶

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

najway91c@gmail.com ^{1*}, alifyazhafira004@gmail.com ², anisahamdah@gmail.com ³,
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id ⁶

Alamat: Jl. A. Yani No.Km.4 5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70235

Korespondensi email: najway91c@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of the legislative body in safeguarding and maintaining democracy in Indonesia from a constitutional law perspective. The research focuses on how the legislature carries out its functions of legislation, oversight, and budgeting to ensure democratic principles are upheld. It also assesses the legislature's role in holding the government accountable and balancing power with the executive and judiciary branches. The findings show that the legislature plays a significant role in creating transparent, accountable governance aligned with the constitution.*

Keywords: *Legislation, Democracy, Supervision, Budget*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran lembaga legislatif dalam mengawal dan menjaga sistem demokrasi di Indonesia melalui perspektif hukum tata negara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran guna memastikan prinsip-prinsip demokrasi berjalan dengan baik. Penelitian ini juga menilai bagaimana legislatif memastikan akuntabilitas pemerintah serta menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan eksekutif dan yudikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislatif berperan signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan konstitusi.

Kata Kunci: Legislasi, Demokrasi, Pengawasan, Anggaran

1. PENDAHULUAN

Lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi, lembaga ini bertugas untuk mewakili aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam konteks hukum tata negara, lembaga legislatif bertindak sebagai institusi yang menjembatani antara pemerintah dan rakyat, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak bertentangan dengan konstitusi.¹

Fungsi legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan dalam merumuskan undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam proses legislasi, DPR berperan dalam memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang disahkan telah melalui proses deliberasi yang

¹ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

transparan dan partisipatif.² Hal ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mencerminkan kepentingan publik dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam mengawal demokrasi, lembaga legislatif juga memiliki peran krusial dalam pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sebagai representasi rakyat, DPR juga memiliki kewenangan dalam menyusun anggaran negara (APBN), yang merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan nasional.³

Secara keseluruhan, lembaga legislatif memegang peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks hukum tata negara, legislatif berfungsi sebagai pengawal demokrasi melalui peran-perannya yang multifungsi, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.⁴

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan normatif. Metode berpikir induktif digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan memulai dari hal-hal spesifik menuju kesimpulan umum, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan diplomatik yang baik bagi kerjasama antar negara. Ketika negara-negara saling berkomunikasi dengan baik, mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah, seperti tantangan ekonomi dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi yang efektif bisa membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Namun, hubungan yang buruk dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti konflik bersenjata dan sanksi ekonomi. Ini menunjukkan betapa rentannya hubungan internasional dan pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif. Faktor-faktor seperti kekuatan relatif negara dan kepentingan nasional sangat mempengaruhi hasil dari hubungan diplomatik ini. Oleh karena

² Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008).

³ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

itu, upaya untuk meningkatkan diplomasi harus terus dilakukan untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan saling menghormati di tingkat global.

Selain itu, hubungan diplomatik juga dapat memperkuat pertukaran budaya antara negara. Dengan adanya interaksi yang baik, masyarakat dari berbagai negara dapat saling mengenal dan menghargai budaya masing-masing. Kegiatan seperti festival budaya, pertukaran pelajar, dan kerjasama di bidang seni dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara bangsa. Ini semua berkontribusi pada terciptanya masyarakat global yang lebih inklusif dan harmonis. Oleh karena itu, investasi dalam diplomasi budaya menjadi sangat penting untuk menciptakan hubungan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memperkaya hubungan antar masyarakat.

Fungsi Legislasi

Dalam konteks hukum tata negara, fungsi lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, sangat penting dalam mengawal demokrasi. Salah satu peran utama DPR adalah sebagai pembentuk undang-undang, yang mencerminkan suara dan kepentingan rakyat. Proses legislasi ini dimulai dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di mana DPR merumuskan rencana undang-undang yang akan dibahas. Setelah itu, DPR menerima dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah atau DPD, memastikan bahwa setiap RUU tersebut melalui proses pengkajian dan pembahasan yang mendalam.⁵

Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta aspirasi rakyat. Dalam praktiknya, DPR dapat melakukan interpelasi, yaitu meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai isu-isu tertentu yang dianggap penting.⁶ Dengan demikian, DPR tidak hanya berperan dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang merupakan bagian integral dari sistem demokrasi.

Di samping itu, DPR juga berfungsi dalam penganggaran, di mana mereka bertanggung jawab untuk menyusun dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui fungsi ini, DPR berperan dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengawasi dan mengelola anggaran, DPR membantu

⁵ Hukumonline., "Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR," t.t.

⁶ Hukumonline.

memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan efisien. Dalam keseluruhan proses ini, fungsi legislatif DPR mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi, yang sangat penting untuk pembangunan negara yang lebih baik dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki peran yang krusial dalam menjaga demokrasi di Indonesia melalui fungsi legislasinya yang sistematis dan terencana.⁷

Pengawasan Eksekutif

Pengawasan eksekutif oleh lembaga legislatif di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam mengawal demokrasi dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan dan kebijakan pemerintah, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh eksekutif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat. Salah satu bentuk pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme pertanyaan, interpelasi, dan hak angket, di mana DPR dapat meminta klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan yang diambil.⁸

DPR juga memiliki peran penting dalam pengesahan anggaran, yang merupakan salah satu cara untuk mengontrol pengeluaran pemerintah. Dengan menolak anggaran yang diajukan, DPR dapat memaksa pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaan dana publik. Hal ini menciptakan iklim akuntabilitas yang diperlukan dalam suatu negara demokrasi.⁹ Selain itu, DPR dapat mengevaluasi pelaksanaan undang-undang dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah jika terdapat ketidaksesuaian antara undang-undang yang telah disahkan dan tindakan pemerintah di lapangan.¹⁰

Pengawasan ini juga mencerminkan prinsip checks and balances, yang merupakan salah satu dasar hukum tata negara Indonesia. Dalam konteks ini, lembaga legislatif berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak digunakan secara sembarangan, serta menjaga agar semua kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan eksekutif oleh lembaga legislatif tidak hanya memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Perwakilan Rakyat

⁷ Diakses dari: [Hukumonline](<https://www.hukumonline.com>) (Halaman yang menjelaskan pengawasan DPR dan fungsinya dalam anggaran), "Fungsi dan Tugas DPR dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah," t.t.

⁸ Program Magister Hukum, "Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia," *Fakultas Hukum*, 4 (2022): 280–93.

⁹ Program Magister Hukum.

¹⁰ Kasim, A, "Peran DPR dalam Pengawasan Eksekutif," *Jurnal Hukum*, 2011, 45–60.

Perwakilan rakyat dalam konteks lembaga legislatif di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam mengawal demokrasi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk merepresentasikan suara rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi untuk pembuatan undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Proses legislasi yang transparan dan partisipatif memungkinkan DPR untuk memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat terakomodasi dengan baik dalam setiap kebijakan yang diambil.¹¹

DPR tidak hanya berfungsi sebagai pembuat undang-undang, tetapi juga sebagai pengawas eksekutif. Dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR memiliki kemampuan untuk menanyakan dan menilai kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi masyarakat. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, DPR juga memiliki kewenangan dalam mengusulkan dan menyetujui berbagai keputusan penting, seperti perjanjian internasional dan pengangkatan pejabat strategis negara, yang semuanya merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹²

Dengan demikian, perwakilan rakyat dalam lembaga legislatif berperan sebagai penjaga demokrasi, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif bukan hanya sekadar bagian dari sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat yang harus dipertahankan dan dijaga.¹³

4. KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengawal demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa DPR memiliki tanggung jawab yang krusial dalam beberapa aspek, termasuk proses legislasi, pengawasan eksekutif, dan representasi rakyat. Sebagai pembentuk undang-undang, DPR memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat terwakili melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif. Selain itu, peran DPR dalam pengawasan pemerintah, baik melalui interpelasi maupun hak angket, memperlihatkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan

¹¹ Rahayu, S, "Peran DPR dalam Pengawasan Eksekutif dan Pembuatan Undang-Undang", *Jurnal Hukum* 12 (2021): 45-60.

¹² Kasim, A, "Peran Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, 100-115.

¹³ Triwulan, T., *"Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945"*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

transparansi, yang merupakan prinsip dasar demokrasi. Dengan pengelolaan anggaran negara yang efektif, DPR juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Oleh karena itu, lembaga legislatif bukan hanya merupakan bagian dari struktur pemerintahan, tetapi juga merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang harus dipertahankan. Secara keseluruhan, peran DPR sangat vital dalam memperkuat dan menjaga demokrasi di Indonesia, mempengaruhi kebijakan publik, serta memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hukumonline. (n.d.). Fungsi dan tugas DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Hukumonline. (n.d.). Tugas dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>.
- Kasim, A. (2011). Peran DPR dalam pengawasan eksekutif. *Jurnal Hukum*, 45–60.
- Kasim, A. (2011). Peran perwakilan rakyat dalam demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 100–115.
- Program Magister Hukum. (2022). Jurnal pembangunan hukum Indonesia. *Fakultas Hukum*, 4, 280–293.
- Rahayu, S. (2021). Peran DPR dalam pengawasan eksekutif dan pembuatan undang-undang. *Jurnal Hukum*, 12, 45–60.
- Triwulan, T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.